

Dinamika Partai Amanat Nasional di Bali Tahun 1999-2019

Hendra Kusuma^{1*}, I Ketut Ardhana², Ida Bagus Gde Putra³

¹²³Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
[[Email:Hendrasm99@gmail.com](mailto:Hendrasm99@gmail.com)], [[Email:ketut_ardhana@unud.ac.id](mailto:ketut_ardhana@unud.ac.id)],
[[Email:gde_putra@unud.ac.id](mailto:gde_putra@unud.ac.id)]

***Corresponding Author**

Abstract

This Study raises the issue of the dynamics of The National Mandate Party (PAN) in Bali after the reformation, from 1999 to 2019. The research method used in this study is the historical method using a behavioral approach. The discussion in the study will focus more on the history of party dynamics, political strategy, and contribution of parties to the social-political life of the Balinese people. Sources of data that will be used in this study include two types of data sources, namely primary sources and secondary sources. The results showed that there were ups and downs in the dynamics of PAN in political contestation in Bali. This condition is caused by a misperception of the Balinese people regarding the party platform which is considered an Islamic party. This misperception has an impact on PAN inconsistency in the general election contestation in Bali. In an effort to improve this perception, massive PAN socializes the party's platform to the community. PAN Bali is also active in actualizing the party platform in every process of forming the management to implementing work program based on Pancasila.

Keywords: *Dynamics, Politics, Election, Bali, Contestation*

Abstrak

Studi ini mengangkat permasalahan dinamika Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali pasca reformasi tahun 1999 hingga 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan pendekatan metodologi sejarah perilaku. Pembahasan dalam studi ini akan lebih difokuskan pada sejarah dinamika partai, strategi politik, dan kontribusi partai terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat Bali. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam jenis sumber data yakni sumber primer dan sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya pasang surut dinamika PAN dalam konstestasi perpolitikan di Bali. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kesalahan persepsi masyarakat Bali terkait dengan platform partai yang dianggap sebagai partai islam. Kesalahan persepsi tersebut berdampak terhadap inkonsistensi PAN dalam kontestasi pemilihan umum di Bali. Dalam upaya memperbaiki persepsi tersebut, PAN massif melakukan sosialisasi platform partai ketengah masyarakat. PAN Bali juga giat mengaktualisasikan platform partai dalam setiap proses pembentukan kepengurusan hingga implementasi program kerja yang berasaskan pada Pancasila.

Kata Kunci: Dinamika, Politik, Pemilu, Bali, Konstestasi.

PENDAHULUAN

Sejak kejatuhan rezim Soeharto dari tampuk kepemimpinannya pada tahun 1998, semangat reformasi tumbuh bak jamur bermekaran di Indonesia. Proses Reformasi berlangsung secara cepat dan berimbas pada hampir setiap sektor kehidupan masyarakat, seperti: ekonomi, politik, hingga pada sektor kehidupan sosial.

Semangat reformasi juga ikut merubah paradigma berpikir para elit politik saat itu, mengenai kualitas demokrasi yang berlangsung selama era pemerintahan Soeharto. Para elit politik dan para aktivisi reformasi tersebut menganggap bahwa kualitas demokrasi Indonesia saat itu sudah menurun terlalu jauh. Diperlukan secepatnya langkah-langkah konkret untuk segera memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Langkah pertama dimulai dengan mengganti jabatan Presiden dari Soeharto menuju Habibie. Di masa pemerintahan Habibie inilah, terjadi perubahan besar pada struktur, sistem, dan kultur politik nasional dengan kebijakan liberalisasi politiknya. Ia telah membebaskan

setiap tahanan politik Orde Baru, mempermudah pembuatan SIUP bagi pers nasional, memberikan kebebasan berorganisasi, memperkuat sistem desentralisasi, dan membuka keran kebebasan membentuk partai politik bagi masyarakat (Wisnurmurti, 2012: 18).

Atas dasar kebebasan yang mulai terbuka tersebut, beberapa elit politik dan aktivis reformasi tersebut membentuk sebuah organisasi bernama Majelis Amanat Rakyat (MARA). Terbentuknya MARA merupakan langkah awal untuk mewujudkan cita-cita bersama memperjuangkan perbaikan demokrasi di Indonesia.

Salah satu tokoh aktivis reformasi yang sentral di dalam internal MARA adalah Prof. Dr. H. Amien Rais (selanjutnya hanya disebut Amien Rais saja). Selain sebagai tokoh intelektual sekaligus aktivis reformasi, Amien Rais juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Amien Rais bersama dengan 49 tokoh nasional lainnya yang tergabung dalam MARA, merubah orientasi gerakan organisasi tersebut menjadi sebuah

partai politik, sehingga memberikan ruang yang luas untuk bergerak. Tepat pada tanggal 23 Agustus 1998, MARA resmi berubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

Bersama dengan Amien Rais, PAN berkembang dengan sangat cepat pada awal kehadirannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sebelum pemilu berlangsung, PAN telah memenuhi segala persyaratan, terutama persyaratan yang mewajibkan sebuah partai politik memiliki perwakilan pengurus di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu entitas perwakilan wilayah tersebut ialah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Bali.

Berbeda dengan kepengurusan PAN di wilayah lainnya, DPW PAN Bali merupakan salah satu kepengurusan PAN yang memiliki keunikan tersendiri. Sejak awal kehadirannya di Bali, respon masyarakat Bali cenderung mengkaitkan PAN sebagai partai Islam. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Bali merupakan penganut agama Hindu, tentu persepsi yang tidak tepat tersebut merupakan

tantangan tersendiri bagi eksistensi PAN di Bali.

Jika berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, maka PAN sebenarnya memiliki sifat sebagai partai terbuka yang dapat menerima segala lapisan masyarakat dari segala golongan (Kompas, 2004: 97-98). PAN bukanlah partai Islam melainkan partai yang menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Prinsip tersebut sangat dipegang erat penerapannya oleh kepengurusan PAN Bali sebagai bagian dari strategi politik. Setiap tahunnya, PAN Bali selalu merekrut beberapa orang Bali sebagai anggota partainya. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, beberapa tokoh-tokoh politik di daerah-daerah pun ikut direkrut baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan partai.

Strategi di atas nampak cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan PAN Bali mengirimkan kader terbaiknya, menjadi anggota DPRD Provinsi Bali pada pemilu tahun 1999 dan 2014. Tak jarang pula, PAN Bali mengirimkan kadernya di beberapa

kursi DPRD Kabupaten/Kota, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana. Namun hingga saat ini, PAN Bali tidak pernah satupun mengirimkan kadernya di DPR-RI. PAN Bali juga tidak terlihat konsisten dalam beberapa penyelenggaraan pemilu seperti pada pemilu tahun 2004, 2009, dan 2019. Pada tahun-tahun tersebut, perolehan suara PAN Bali bahkan mengalami penurunan sehingga beberapa kali tidak dapat mempertahankan kursi dewan yang sebelumnya berhasil diraih.

Sekalipun nampak penurunan perolehan suara di beberapa pemilu terakhir yakni pada tahun 2004, 2009, dan 2019. PAN Bali hingga saat ini masih tetap eksis dalam kancah kontestasi perpolitikan di Bali. Maka dari itu, pokok pembahasan dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada proses dinamika PAN dalam mengikuti kontestasi perpolitikan di Bali tahun 1999-2019. Dalam upaya membuktikan hipotesis awal tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian sebagai berikut, yakni (1) Bagaimana dinamika Partai Amanat Nasional di Bali?, (2) Mengapa Partai

Amanat Nasional tetap eksis dalam kontestasi perpolitikan di Bali?, (3) Apa saja kontribusi Partai Amanat Nasional terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat Bali?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penulisan sejarah lokal di Indonesia, terutama pada tema-tema sejarah politik. Selain itu, studi ini diharapkan pula menjadi bahan pertimbangan analisis bagi kepengurusan DPW PAN Bali, dalam upaya menyusun strategi politik partai dimasa yang akan datang.

METODE DAN TEORI

Studi ini menggunakan metode sejarah sebagai dasar rancangan yang meliputi langkah-langkah penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang baku. Metode sejarah adalah rekontruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analisis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah (Nurfitriyani, 2013:64-65). Terdapat beberapa langkah dalam proses penulisan

sejarah yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi data, interpretasi data, dan historiografi.

Selain itu, untuk menghasilkan penelitian yang menekankan objektivitas maka diperlukan sebuah metodologi. Studi ini akan menekankan metodologi sejarah politik, dengan pendekatan sejarah behaviorial atau perilaku (Kuntowijoyo, 2003: 179). Lingkup pembahasan sejarah perilaku ini, meliputi: perilaku partai-partai politik dalam menyosialisasikan gagasan, rekrutmen pimpinan atau anggota, dan pelaksanaan tindakan politik termasuk dalam sejarah perilaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang menekankan pada data yang berbentuk uraian deskriptif, ungkapan-ungkapan, dan makna-makna. Maka dari itu, sumber data yang digunakan dalam studi ini akan dibagi menjadi dua macam jenis sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam studi ini adalah yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang akan diteliti seperti surat-surat keputusan, foto-foto dokumenter, wawancara

dengan pelaku sejarah, ataupun benda-benda yang dihasilkan dari peristiwa yang akan diteliti.

Meskipun dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kuantitatif yang berkaitan dengan angka-angka, terutama berkaitan dengan jumlah pemilih, hasil pemilihan umum, dan data lainnya yang berkaitan dengan itu juga akan digunakan untuk melengkapi sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Teori sejarah menurut Ida Bagus Sidemen, akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam studi ini. Ida Bagus Sidemen membagi unsur dalam teori sejarah menjadi lima unsur, pertama adalah pemahaman dalam sejarah (*historical understanding*), Kedua adalah penjelasan masa lalu (*historical explanation*), Ketiga adalah objektivitas dalam sejarah (*historical objectivity*), Keempat adalah kausalitas dalam sejarah (*historical causation*), dan Kelima adalah determinasi dalam sejarah (Sidemen, 1991: 30-31).

PEMBAHASAN

Situasi Politik Menjelang Reformasi 1998 dan Kemunculan Partai Politik Baru di Bali

Kondisi perekonomian yang semakin parah, terutama sejak krisis yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 telah menyebabkan ribuan warga sipil yang dimotori oleh kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Para demonstran tidak hanya menuntut soal perbaikan ekonomi, juga menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Selain itu, para demonstran juga menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Aksi-aksi demonstrasi tersebut memakan korban jiwa, terutama yang berasal dari warga sipil akibat dari tindakan subversif Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Demonstrasi besar-besaran tidak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga terjadi di Bali. Saat krisis berlangsung, banyak pengusaha hotel di Bali memutuskan untuk merumahkan karyawannya. Kegiatan pariwisata di Bali sempat lesu pada masa krisis 1997-1998. Harga bahan

pokok melonjak naik, sehingga semakin memperberat kondisi perekonomian masyarakat. Fakta tersebut menginisiasi gerakan mahasiswa di Bali untuk melakukan demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi. Aksi damai pun dilakukan di beberapa kampus, seperti Universitas Udayana (UNUD) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singaraja. Mahasiswa UNUD mengadakan mimbar bebas di wilayah kampus UNUD, Jalan Sudirman pada 3 Maret 1998. Ratusan mahasiswa UNUD tersebut prihatin akan kondisi perekonomian Bali selama masa krisis moneter. Selain UNUD, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) STKIP juga mengadakan aksi mimbar bebas di kampus Jalan Ahmad Yani Singaraja pada tanggal 6 Maret 1998.

Pada awalnya aksi-aksi yang diadakan para mahasiswa tersebut berjalan dengan sangat lancar dan damai. Akan tetapi menjelang jatuhnya rezim Orde Baru, ABRI makin menunjukkan sikap represivitasnya terhadap gerakan mahasiswa. ABRI bahkan menangkap beberapa pentolan aksi mahasiswa di

Bali. Beberapa aktivis mahasiswa Bali seperti I Wayan Gendo Suardana dan Gentry F. Amalo menjadi sasaran penangkapan oleh ABRI.

Kekisruhan politik tahun 1998, pada akhirnya memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat sipil, sekaligus menghidupkan kembali gairah demokrasi Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik (Satrio, 2003: 8).

Setelah terbitnya Undang-undang tersebut, sekitar kurang lebih 141 partai politik baru terbentuk. Beberapa partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman, antara lain: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kristen Nasional Indonesia (PKNI), Partai Republik (PR), Partai Keadilan (PK), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Rakyat Demokratik

(PRD), Partai Nasional Indonesia (PNI) Front Marhaenis, dan lain-lainnya.

Banyaknya jumlah partai politik baru tersebut, tak luput dari mudahnya persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat yang ingin mendirikan sebuah partai politik. Saat itu, partai politik tidak perlu memiliki struktur fungsionaris yang lengkap jika ingin membentuk sebuah pimpinan cabang. Sebuah partai politik cukup hanya mengisi jabatan ketua dan sekretaris cabang saja, agar dapat melengkapi berkas pendaftaran (Masyrofa, 2003:168-169). Namun, dari banyaknya jumlah partai tersebut, partai politik kemudian disaring kembali hingga hanya ada 48 partai saja yang pada akhirnya dapat lolos menjadi kontestan pada pemilu tahun 1999.

Dari sekian banyaknya partai tersebut, PAN merupakan salah satu partai yang memiliki perwakilan di Bali. Pada masa awal terbentuknya, citra PAN sendiri cukup baik di mata masyarakat Bali. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat popularitas sosok Amien Rais yang merupakan salah

satu tokoh sentral penggerak reformasi, selain Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Popularitas Amien bahkan nampak terlihat dalam salah satu momen acara peresmian PAN Bali Timur. Saat itu Amien Rais sempat dihadang oleh pengunjung rasa yang dikoordinasi oleh Pande Ketut Cemara. Amien dipaksa untuk melihat spanduk yang berisikan tuntutan untuk memeriksa mantan Kapolda Bali Bimantoro, mantan Kaditserse Togar Sianipar, serta mantan Kasat Serse Polres Gianyar Sultara, terkait dengan kasus kematian Pande Wayan Yunaka. Mereka datang dengan mengharapkan bahwa sosok Amien Rais dapat membantu mereka untuk menekan pihak kepolisian, agar secepatnya mengusut kasus kematian Pande Wayan Yunaka. Meskipun tak merespon, kejadian ini menunjukkan betapa cukup populernya sosok Amien Rais di mata masyarakat Bali pada waku itu.

Namun, sosok Amien Rais yang erat dihubungkan dengan Muhammadiyah sekaligus juga tokoh

cendikiawan dan religius Islam, menyebabkan masyarakat Bali secara cepat menyimpulkan bahwa PAN merupakan partai Islam. Mispersepsi masyarakat Bali tersebut menjadi kendala bagi PAN Bali.

Padahal sejak sedari awal pendiriannya, PAN memposisikan dirinya sebagai partai yang terbuka dan bukanlah partai yang berideologikan agama tertentu. Dalam Anggaran Dasar PAN tahun 1998, partai ini bahkan pernah menggunakan Pancasila sebagai landasan partai. Akan tetapi pada Anggaran Dasar PAN yang terbaru tahun 2010 tepatnya pada pasal 4 dan 6 telah ditegaskan bahwa PAN adalah partai politik yang berasaskan akhlak politik dengan berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. “Agama” yang tercantum dalam Anggaran Dasar tersebut tidak mempresentasikan secara khusus salah satu agama tertentu, melainkan pernyataan secara general dari setiap agama yang ada.

Sebagai strategi memperbaiki persepsi tersebut, PAN Bali berupaya hadir ke tengah-tengah masyarakat Bali. Secara bertahap dibentuklah

kepengurusan partai diseluruh daerah tingkat II atau Kabupaten di Bali. Kurang dari setahun, kepengurusan daerah di Bali sudah terbentuk lengkap.

Jumlah anggota PAN di Bali pada waktu itu, tidak sebanyak seperti yang dimiliki oleh partai lainnya seperti PDI-P maupun Golkar. Karena, dalam proses perekrutan massa, PAN Bali lebih mengutamakan segi kualitas kader bukan kuantitas. Anggota PAN Bali terlebih dahulu harus memahami betul platform partai, prinsip dasar, hingga tujuan dari partai. Hal ini diperlukan, karena anggota PAN lah yang nantinya akan menjadi ujung tombak sosialisasi partai ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam proses merekrut anggota, PAN tidak secara masif merekrut banyak kader dengan cara merayu, menghasut, apalagi dengan menjanjikan sesuatu dalam bentuk material.

Selama masa kampanye, PAN se-Bali cukup giat melakukan konsolidasi secara masif ke daerah-daerah. Meskipun situasi politik di Bali pada masa kampanye 1999 memang cukup mencekam, karena

adanya konflik rivalitas antar partai politik. Akan tetapi, PAN Bali tak ikut larut dalam konflik tersebut. Salah satu rivalitas partai politik yang paling menonjol, ialah rivalitas antara PDI-P dengan Golkar yang memiliki massa pendukung terbanyak di Bali.

Sehingga, dalam upaya menciptakan suasana perpolitikan Bali yang damai dan tentram, PAN Bali sangat terlibat aktif dalam upaya menengahi konflik antar partai selama masa kampanye pemilu 1999 di Bali. PAN Bali tak segan untuk bekerjasama dalam menjaga hubungan harmonis dengan partai lainnya. PAN Bali menjadi inisiator dalam pembentukan Forum Komunikasi Partai Politik se-Bali (Forkom Parpol). Tujuan dibentuknya Forkom Parpol tersebut, diharapkan menjadi wadah untuk diskusi antar partai dan sebagai tempat penyelesaian masalah yang timbul di lapangan. Dalam memantau situasi di lapangan, Forkom membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan 300 orang yang masing-masing berasal dari perwakilan setiap partai politik.

Tantangan dan Peluang PAN dalam Dinamika Perpolitikan di Bali

PAN sebagai salah satu partai yang lolos verifikasi KPU, tentu memiliki ambisi besar untuk memenangkan pemilu tahun 1999. Namun sayang, PAN nampaknya belum cukup mampu memenangkan pemilu. Berdasarkan hasil pemilu 1999, PAN secara nasional hanya berhasil menduduki peringkat ke-5 setelah PPP, PKB, Golkar, dan PDI-P di peringkat pertama hingga keempat. PAN memperoleh 7.504.900 suara atau setara dengan 7,1% total suara sah nasional pada waktu itu. Maka dengan begitu, PAN berhak atas 34 kursi parlemen. Posisi spektrum politik PAN yang masih dianggap tidak terlalu tegas, menyebabkan banyak suara pemilih mengarah ke partai lainnya.

Situasi tersebut berdampak pada posisi PAN Bali, pada kontestasi pemilu tahun 1999 di Bali. Sejak sedari awal, serangan sudah muncul dari lawan-lawan politiknya yang giat melemparkan tuduhan bahwa PAN merupakan partai Islam. Mereka memanfaatkan isu tersebut untuk mempengaruhi mayoritas masyarakat

Bali yang merupakan penganut agama Hindu. Memang pada umumnya afiliasi politik masyarakat Bali akan cenderung mengikuti kesetiaan-kesetiaan lokal yang cukup bertahan kuat dan dapat mempengaruhi proses politik lokal (Pramana, 2015). Maka dari itu, Orang Bali akan berupaya untuk mempertahankan jati diri atau identitasnya dengan berpegang teguh pada agama, adat, dan budaya Bali termasuk juga setia pada entitas politik lokal (Putra, 2011: 125).

Terpilihnya I Wayan Dhana yang merupakan mantan Bupati Badung sebagai ketua pertama DPW PAN Bali, merupakan salah satu strategi PAN Bali dalam menghadapi pemilu tahun 1999. Diharapkan dengan sosok ketokohan I Wayan Dhana, dapat menarik suara masyarakat Bali memilih PAN. Tentu hal ini berdasarkan pertimbangan atas realitas masyarakat yang cenderung memberikan suaranya pada tokoh-tokoh yang dianggapnya ideal dan sesuai (Azhar, 2017: 118). Hasilnya, PAN Bali sukses memperoleh satu kursi DPRD Provinsi Bali pada pemilu 1999. Tak hanya itu, PAN Bali

juga berhasil memperoleh dua kursi DPRD Kota Denpasar dan beberapa kursi DPRD daerah tingkat II. Perincian kursi yang berhasil diperoleh PAN Bali pada pemilu tahun 1999 tersebut, yakni satu kursi DPRD di Kabupaten Badung dan dua kursi DPRD di Kabupaten Jembrana.

Salah satu daerah yang paling menonjol bagi perolehan suara PAN adalah Kota Denpasar. PAN pada pemilu tahun 1999 di Kota Denpasar, berhasil memperoleh 4,1% suara dari total suara sah yang ada dan berada pada posisi ketiga. Sedangkan PDI-P, menduduki peringkat pertama dalam perolehan suara di Kota Denpasar dengan berhasil meraih 76,7% suara.

Pada pemilu 1999 ini, PDI-P berhasil menjadi pemenang, mengungguli Golkar dengan memperoleh 79% suara. Hal ini, menurut Henk Schulte Nordholt disebut sebagai gempa bumi karena timpangnya hasil perolehan suara PDI-P dan Golkar pada pemilu tahun 1997 dengan pemilu tahun 1999 (Nordholt, 2007: 513).

Berbeda dengan hasil yang diperoleh PAN pada pemilu tahun 1999. Pada pemilu tahun 2004, PAN

gagal mempertahankan satu kursi DPRD Provinsi Bali yang berhasil mereka peroleh dalam pemilu tahun 1999. Hal ini banyak disebabkan oleh situasi permasalahan internal yang dihadapi PAN, saat Faisal Basri mengundurkan diri sebagai pengurus partai.

Kemunduran Faisal Basri rupanya diikuti juga oleh 22 pengurus DPW PAN Bali periode 2000-2005 yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka menganggap bahwa telah terjadi pergeseran platform partai ke arah sektarian. Meskipun demikian, PAN berhasil mempertahankan beberapa kursi DPRD Kabupaten/Kota terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana. Pada pemilu 2004 ini, PAN memperoleh 18.784 suara dari 1.994.303 total suara sah. Sedangkan PDI-P, masih menjadi partai pemenang dengan memperoleh 1.001.715 suara, diikuti oleh Golkar dengan 353.363 suara di Bali.

Namun meskipun begitu, PAN Bali masih dapat mempertahankan empat kursi DPRD Kabupaten/Kota, yakni dua kursi dalam DPRD Kabupaten Jembrana dan dua kursi

dalam DPRD Kota Denpasar. Hal ini membuktikan, bahwa PAN Bali masih mampu menjaga suara konstituennya di tingkat akar rumput, terutama di daerah Kota Denpasar yang menjadi pusat suara PAN sejak tahun 1999.

Pasca pemilu 2004, kondisi internal PAN Bali semakin memburuk. PAN seringkali melanggar aturan-aturan pemilu hingga terancam tidak dapat mengikuti pemilu di Bali. Salah satu contohnya ialah saat DPD PAN Kota Denpasar tidak mampu menyetorkan rekening awal kampanye, sampai batas waktu terakhir yang diberikan oleh KPU Kota Denpasar selesai. Hal itu menyebabkan KPU Kota Denpasar menjadi berang sehingga terpaksa memberangus segala peraga kampanye yang dimiliki DPD PAN di seluruh Kota Denpasar.

Selanjutnya, pada pemilu 2009, perolehan suara PAN cenderung mengalami penurunan drastis daripada pemilu sebelumnya. Jika pada pemilu tahun 2004 PAN berhasil memperoleh 18.784 suara, maka pada pemilu tahun 2009 ini PAN hanya mampu memperoleh

6.078 suara. Pada Pemilu 2009 ini, Partai Demokrat berhasil menjadi partai pemenang dengan memperoleh 20,58% suara, disusul oleh Golkar dengan 14,45% suara, dan PDI-P diperingkat ketiga dengan 14,03% suara (Firmanzah, 2010).

Menurunnya suara PAN, selain disebabkan oleh kurang matangnya persiapan, juga disebabkan oleh serangan politik dari musuh-musuh politiknya di Bali. Menjelang tiga hari sebelum pemilu, sekelompok orang menyebarkan selebaran *Black Campaign* kepada masyarakat Desa Pekutatan dan Puluhan Jembrana. Selebaran itu berisikan ajakan pada masyarakat Jembrana untuk tidak memilih partai yang tertera dalam daftar list. Beberapa partai seperti PKS, PPP, Golkar, dan PAN terdapat dalam isi selebaran tersebut. Akibat serangan *Black Campaign* yang dialami PAN Jembrana itu, suara PAN Jembrana menjadi tergerus dengan hanya memperoleh 912 suara saja.

Akibatnya, PAN Bali kembali gagal untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Bali pada pemilu 2009. Bahkan yang sangat disayangkan,

PAN Bali tidak mampu mempertahankan beberapa kursi DPRD Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar yang sebelumnya mereka miliki.

Dalam pemilu 2014, PAN Bali kembali menggunakan strategi yang sama seperti yang digunakannya pada pemilu tahun 1999. Pada pemilu 2014 ini, PAN Bali mendekati I Ketut Jengiskan untuk digaeet sebagai calon DPRD Provinsi Bali dari dapil Buleleng. Beliau merupakan anak dari tokoh politik ternama Buleleng bernama Ketut Kadjar. Ketut Kadjar sendiri merupakan tokoh politik yang masuk dalam formasi Trio KOKAR.

Trio KOKAR sendiri merupakan singkatan dari Koyan, Kajar, dan Rama yang merupakan tokoh-tokoh politik penting dalam kontestasi perpolitikan di Buleleng. Kelompok ini dahulunya mampu mempengaruhi perolehan suara partai politik di Kabupaten Buleleng. Golkar hingga PDI-P selalu dapat memenangi perolehan suara di Buleleng apabila mendapatkan dukungan dari trio KOKAR ini (Suryawan, 2005:22). PAN berupaya memanfaatkan popularitas Ketut

Kadjar yang ada di dalam diri I Ketut Jengiskan untuk dapat menarik simpati masyarakat pada pemilu 2014.

Selain mendekati tokoh-tokoh politik tertentu, PAN Bali juga aktif dalam melakukan giat-giat sosial di masyarakat sebagai bagian dari pendekatan dan sosialisasi politik PAN dengan masyarakat Bali pada pemilu 2014 ini. Pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2014, PAN Bali membagikan 4.000 bibit pohon gamelina di Balai Subak Abian Timur Sari Banjar Bila Kanginan, Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Pada kegiatan tersebut, PAN Bali mengerahkan ratusan massa demi lancarnya kegiatan. Program ini juga menjadi keikutsertaan PAN dalam mewujudkan program pemerintah Provinsi Bali yakni "*Green and Clean*"

Strategi tersebut rupanya berhasil. Perolehan suara PAN Bali mengalami kenaikan drastis dengan berhasil meraup hingga 26.005 suara. Jika dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sesungguhnya peroleh suara PAN masih kalah dengan PKS yang

berhasil meraih 44.873 suara dalam pemilu 2014 di Bali. Namun karena I Ketut Jengiskan memperoleh suara cukup besar di Buleleng, maka PAN berhasil memperoleh satu kursi DPRD Provinsi Bali sedangkan PKS gagal memperoleh kursi tersebut. Meskipun begitu, PAN Bali kembali gagal memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Bali.

Nampaknya keberhasilan tersebut diakibatkan oleh adanya efek ekor jas. Efek ekor jas sendiri merupakan istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain. Calon pemimpin populer yang diusung oleh suatu partai politik secara tidak langsung mempengaruhi sikap pemilih untuk memilih partai yang memiliki hubungan dekat dengan calon pemimpin populer tersebut. PAN yang mengusung kadernya menjadi Calon Wakil Presiden yakni Hatta Rajasa akan sangat diuntungkan karena pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mengusung sosok populer tersebut.

Tiga bulan pasca pelaksanaan kongres PAN ke-IV di Bali tahun 2015, DPW PAN Bali langsung

mempersiapkan diri untuk melaksanakan Musywil ke-IV nya. Pada Musywil kali ini, I Ketut Jengiskan terpilih secara aklamasi setelah Nyoman Gede Suweta menolak untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua DPW PAN Bali Periode 2015-2020.

Pada masa kepemimpinannya, terjadi riak-riak permasalahan dalam tubuh internal PAN Bali. Permasalahan terjadi ketika PAN Bali sedang mempertimbangkan untuk menentukan arah koalisinya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali tahun 2018. Keputusan pusat yang diwakili oleh Zulkfli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN memilih untuk mengusung Calon Gubernur I Wayan Koster dalam Pilgub 2018. Akan tetapi, DPD PAN se-Bali sesungguhnya menentang keputusan DPP PAN yang memutuskan untuk mendukung pasangan Cagub Cawagub Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam Pilgub 2018. Hal ini dikarenakan sebelumnya DPD PAN se-Bali sudah sepakat untuk mendukung pasangan Cagub Cawagub Rai Dharmawijaya Mantra-Sudikerta dalam Pilgub 2018.

Namun, keputusan DPP PAN yang didukung oleh DPW PAN Bali tetap menjadi keputusan final. Oleh karena itu, DPD PAN Kabupaten Bangli secara terang-terangan membelot untuk mendukung pasangan Rai – Kerta dibandingkan mendukung Koster-Ace yang sesuai dengan instruksi pusat. Kurangnya koordinasi antara ketua serta pengurus DPW PAN Bali dengan segenap pengurus DPD PAN Bangli dianggap menjadi alasan utama membelotnya DPD PAN Bangli dari rekomendasi pusat. Meskipun pada akhirnya pasangan Koster-Ace berhasil memenangi Pilgub dengan berhasil memperoleh 1.211.556 suara atau 57,62% dari total suara sah. Akan tetapi permasalahan tersebut masih berlanjut pasca Pilgub.

Akibatnya, PAN Bali berusaha dan berjuang lebih keras lagi dalam pemilu 2019. Dalam upaya mendulang kembali suara, strategi yang sebelumnya berhasil tersebut dicoba kembali untuk pemilu tahun 2019. Akan tetapi, kali ini PAN Bali cukup kesulitan dalam mencari tokoh-tokoh yang ingin menjadi caleg PAN.

Pada akhirnya, PAN Bali gagal mendapatkan tokoh yang diinginkan untuk dicalonkan menjadi anggota caleg PAN pada pemilu 2019. PAN Bali pada pemilu 2019 juga mengalami krisis kader sehingga banyak daerah tidak menyetorkan nama caleg. Beberapa daerah tersebut adalah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Kota Denpasar. Akibatnya perolehan suara PAN Bali mengalami penurunan dari sebelumnya memperoleh 26.005 suara, pada pemilu tahun ini menurun drastis dengan hanya memperoleh 12.375 suara. Dapil Buleleng yang berperan besar terhadap keberhasilan PAN pada pemilu tahun 2014 pun juga tidak mampu mempertahankan perolehan suaranya dengan hanya mampu memperoleh 9.567 suara. Akibatnya, PAN harus merelakan kursi DPRD Provinsi Bali yang sebelumnya diperoleh pada pemilu 2014. PAN juga kembali gagal memperoleh kursi-kursi DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah Bali.

Kontribusi PAN dalam Kehidupan Sosial-Politik Masyarakat Bali

Pernah memperoleh dua kali kursi DPRD Provinsi Bali di dua periode berbeda yakni pada tahun 1999 dan 2014, menyebabkan PAN Bali memiliki kesempatan untuk merealisasikan visi dan misi ataupun program kerja yang ditawarkannya kepada masyarakat Bali. Dalam upaya mewujudkan tujuan PAN, yakni Indonesia baru yang adil dan sejahtera secara sosial, maka I Ketut Jengiskan mewakili PAN yang tergabung di dalam Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali, mengusulkan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2018 agar memberikan bantuan keuangan kepada semua lembaga keagamaan yang ada di Bali.

Bantuan itu dibagikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di Bali seperti Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Keuskupan Denpasar, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam pembinaan umat

beragama di Bali sehingga diharapkan dapat menciptakan kondisi moral dan spiritual masyarakat yang baik sebagai salah satu kunci kemajuan pembangunan.

Selain itu, PAN melalui wakilnya, Jengiskan juga mengusulkan penghapusan Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Pemasukan Kendaraan Bermotor Bekas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyederhanakan peraturan yang sudah ada agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Setelah penghapusan Perda tersebut, maka satu-satunya peraturan yang akan berlaku adalah Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Muatan kedua perda yang dianggap memiliki kesamaan menjadi alasan bagi Fraksi Panca Bayu mengusulkan menghapus perda tersebut. Selain itu, Perda Nomor 8 Tahun 2000 dianggap mempersulit proses mutasi kendaraan luar yang sudah lama berada di Bali sehingga menghilangkan potensi penambahan pendapatan daerah. Tentu, dengan penghapusan Perda tersebut menjadi

ikhtiar pemerintah untuk menambah sektor pendapatan daerah.

Usulan Ranperda tersebut pada akhirnya berhasil disepakati bersama oleh Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali pada tanggal 22 Maret 2018. Hal ini jelas telah mempermudah mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan berplat luar, terutama beberapa kendaraan yang dibatasi sebelumnya seperti mobil barang yang telah berumur di atas 5 tahun, mobil penumpang atau mobil bus yang digunakan untuk umum dengan umur kendaraan di atas 7 tahun, dan mobil pribadi yang tidak digunakan untuk umum dengan umur kendaraan di atas 10 Tahun untuk dapat melakukan mutasi kendaraannya di Bali.

PAN Bali melalui wakilnya, I Ketut Jengiskan juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan. Ia melihat adanya potensi perekonomian yang cukup besar di pesisir pantai yang apabila bisa dimanfaatkan dengan baik akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Maka dari itu,

Jengiskan memberikan perhatiannya secara serius pada permasalahan ini.

Langkah awal yang dilakukan ialah mempersiapkan secara matang pengusulan Ranperda Bendega. *Bendega* sendiri adalah sebuah lembaga tradisional masyarakat adat Bali yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan. *Bendega* ini termasuk dalam tiga lembaga tradisional Bali, selain Subak dan Desa Adat. Keberadaan lembaga ini sering kali tersisihkan. Proses pembahasan Ranperda ini cukup panjang hingga pada akhirnya berhasil diselesaikan dengan disahkannya Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega.

Keberhasilan ini tentu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nelayan. Perda ini salah satunya mengatur mengenai hak yang sama dalam penggunaan lahan pesisir pantai antara investor dan nelayan. Investor yang memiliki lahan hotel di pesisir pantai tidak lagi memiliki hak untuk mengusir ataupun melarang nelayan menyandarkan kapalnya. Keberadaan lembaga tradisional *Bendega* pun juga telah diakui oleh pemerintah sehingga

memperoleh bantuan resmi dari pemerintah provinsi, seperti halnya Subak dan Desa Adat (Siki, 2018: 376-385).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi eksistensi PAN dalam kontestasi perpolitikan di Bali. Pertama, PAN Bali telah berhasil mempraktikkan dengan baik prinsip dasar partai yakni keterbukaan. Hal ini memberikan keuntungan sendiri bagi PAN Bali terutama dari segi reaktualisasi kepengurusan partai. Sejak awal pencarian kader-kader potensial, PAN Bali tidak selalu mengutamakan kader-kader yang memiliki latar belakang Muhammadiyah maupun yang beragama Islam, akan tetapi lebih memfokuskan untuk merekrut calon-calon kader dari kalangan non muslim. Oleh karena itu, tidak jarang jabatan pimpinan wilayah PAN Bali selalu dipimpin oleh tokoh Bali dari kalangan non muslim. Hal ini berbeda dengan partai yang memiliki garis ideologi dasar Islam yang tegas seperti PKB, PPP, dan PKS.

Meskipun begitu, mayoritas kader PAN Bali tetap merupakan warga Muhammadiyah.

Kedua, kepemimpinan tokoh-tokoh masyarakat Bali di dalam kepengurusan DPW PAN Bali rupanya memberikan efek cukup positif terhadap upaya mengerek suara PAN. Hal tersebut dibuktikan oleh keberhasilan PAN Bali memperoleh dua kursi DPRD Provinsi Bali di dua kali penyelenggaraan pemilu yang berbeda yakni pada tahun 1999 dan 2014. Saat itu, sosok I Wayan Dhana selaku mantan Bupati Badung dan I Ketut Jengiskan, yakni seorang tokoh muda Buleleng berperan besar menarik suara masyarakat Bali untuk memilih PAN.

Namun meskipun begitu, PAN Bali tetap mengalami kesulitan dalam berkontestasi di Bali. PAN menghadapi banyak sekali tantangan mulai dari prinsip partai yang belum benar-benar dipahami oleh sebagian besar masyarakat Bali, kurangnya kader yang menjadi pengurus di beberapa daerah di Bali, serta serangan-serangan politik yang dilakukan secara tertutup maupun

terang-terangan dari musuh politik PAN yang ingin menjatuhkan citra PAN Bali. Akan tetapi, PAN Bali masih nampak eksis dan tetap kontestasi hingga saat ini.

Penulis menyarankan agar PAN segera mempertegas spektrum politiknya, agar dapat lebih fokus lagi dalam menggaet target kontistuenya tanpa harus menghilangkan ciri khas religiusnya. Maka dari itu PAN Bali harus tetap memegang teguh prinsip partai sebagai partai yang berperinsipkan non-sektarian dan non-diskriminatif. Hal tersebut merupakan modal peluang bagi PAN Bali untuk secara lebih luas lagi dapat menerima segala lapisan tanpa memandang golongan, suku, dan kelompok yang ada pada masyarakat Bali. Penulis juga menyarankan agar PAN Bali segera memulai untuk lebih fokus pada memperluas jaringan partainya terutama terkait dengan menggaet massa di tingkat akar rumput. Upaya tersebut dilakukan agar PAN Bali lebih dekat lagi dengan masyarakat dalam menyosialisasikan program kerja, prinsip, dan platform partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azhar, Anang Anas. 2017. *Pencitraan Politik Electoral: Kajian Politik Segitiga PAN dalam Merebut Simpati Masyarakat*, Yogyakarta: Atap.

Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kompas, Tim Litbang. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.

Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nordholt, Henk Schulte. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. (2012). *Relasi Kuasa Penguatan Demokrasi Lokal di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Jurnal

Masyrofah. 2003. "Arah Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-undang Politik Pasca Reformasi", *Jurnal Cita Hukum*, (1)2. DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2988>

- Pramana, Gede Indra. (2015). "Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (8)2. DOI: <https://doi.org/10.31947/jgov.v8i2.111>
- Putra, I Nyoman Darma. 2011. "Politik Identitas dalam Teks Sastrawan Bali", *Jurnal Kajian Bali*, (1)1.
- Satrio, Be. 2003 . "Menuju Sistem Pemilu yang Matang", *Majalah Kompas*, Edisi 213.
- Sidemen, Ida Bagus. 1991. "Lima Masalah Pokok dalam Teori Sejarah", *Majalah Widya Pustaka*, (8)2.
- Siki, Renhat Marlianus. (2018). "Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda tentang Bendega", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (7)3, 2018.
- Suryawan, I Ngurah. 2005. "Politik Kekerasan Para Jagoan dan Dendam di Bali: Beberapa Catatan di Lapangan", *Jurnal Antropologi UI*. DOI: <https://doi.org/10.7454/ai.v0i1.3577>.
- Skripsi**
- Nurfitriyani, Feni Endah. (2013) "Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara tahun 1967-1998)". Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pebriana, Ni Wayan Agus. (2021). "Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Persaingan Politik di Bali Tahun 1999-2019". Denpasar: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Sujatmiko, Toto. (2015). "Pemilu Multipartai di Bali Tahun 1999 dan 2004". Denpasar: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Artikel Internet**
- Andini, Raiza. "PAN Belum Resmi Keluar dari Koalisi Rakyat Bali", pada laman <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/JKR1EOQb-pan-belum-resmi-keluar-dari-koalisi-rakyat-bali>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Perhitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019", <https://www.bps.go.id/%20statistable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019>, diakses pada tanggal 4 April 2022.
- Chaterine, Rahel Narda. "Cerita Faisal Basri Keluar dari PAN dan Mendirikan Pergerakan Indonesia", <https://nasional.kompas.com>

[/read/2021/06/28/14190391/
cerita-faisal-basri-keluar-
dari-pan-dan-mendirikan-
pergerakan-indonesia,](#)
(diakses pada tanggal dari 10
April 2022)

Sholeh, Muhammad. “Ini Alasan
PAN Gelar Kongres IV di
Bali”,
[https://www.merdeka.com/p
olitik/ini-alasan-pan-gelar-
kongres-ke-iv-di-bali.html,](https://www.merdeka.com/politik/ini-alasan-pan-gelar-kongres-ke-iv-di-bali.html)
(diakses pada tanggal 16 Mei
2022).